

BAB I

PENDAHULUAN

Sekotong merupakan salah satu kawasan di Lombok Barat, Nusa Tenggara yang kaya akan potensi baik alam, budaya maupun lokasi yang strategis (Iswanto, Ramayanto, Permadi, & Abdurrahman, 2020). Ditetapkannya KEK Mandalika yang berlokasi di pulau Lombok sebagai destinasi super prioritas, seharusnya secara konseptual dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata berkelanjutan di destinasi penyangga yang tidak jauh dari KEK Mandalika, termasuk kawasan pesisir Sekotong. Meninjau kondisi Sekotong dengan berbagai potensi dan faktor yang menjadi kendala dalam perkembangannya, maka tesis ini meninjau hal-hal sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Sustainable Tourism (pariwisata berkelanjutan) telah menjadi paradigma yang berkembang pada sektor pariwisata, dan menjadi prasyarat serta tolok ukur pembangunan di suatu destinasi, termasuk di Indonesia (Pranita, 2016). Dalam perkembangannya, konsep ini merujuk pada kondisi lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan manajemen di suatu destinasi sesuai dengan GSTC (*Global Sustainable Tourism Council*) *Destination Criteria* Version 2.0 (Borland & Lindgreen, 2013; The Global Sustainable Tourism Council, 2019). Penurunan salah satu aspek akan berdampak signifikan

terhadap keberlangsungan dan keberhasilan pada destinasi tersebut (Pranita, 2016).

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan *World Economic Forum* (WEF) pada “*Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2021*”, Indonesia menempati posisi ke-32 dari 117 negara dunia, dimana posisi ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang menduduki urutan ke-42 (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), 2020). Urutan ini telah melampaui negara Thailand dan Malaysia yang pada tahun 2021 berada di urutan 38 dan 36 dunia. Meskipun posisi Indonesia lebih tinggi, urutan ini masih jauh tertinggal dari Singapura yang menduduki urutan ke-9 dunia. Menurut WEF, aspek yang menentukan penilaian adalah aspek lingkungan pendukung (*enabling environment*), pasar (*markets*), modal manusia (*human capital*) dan ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*) (Nadia, Damia, & Riza, 2020). Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khusus terutama terkait dengan tata kelola dan perilaku pembangunan pariwisata yang mempengaruhi kualitas sumber daya alam serta pencapaian target *sustainability* di tahun 2030. Selain itu, untuk meningkatkan ranking yang telah dicapai pada tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2023) menyatakan pariwisata Indonesia harus memperhatikan pilar yang ada seperti infrastruktur pendukung pelayanan pariwisata (*tourist service infrastructure*), kesehatan dan kebersihan (*health and hygiene*), ketahanan dari segala kondisi dan permasalahan sosial ekonomi (*socioeconomic resilience and condition*), keberlangsungan lingkungan (*environmental sustainability*), dan

pemanfaatan teknologi dalam mendukung perkembangan pariwisata di era milenial saat ini (*information and communication technology (ICT) Readiness*). Oleh karenanya, untuk mencapai target yang diharapkan pengelolaan pariwisata perlu memperhatikan segala aspek di atas baik yang menjadi strategi Kemenparekraf maupun penilaian dari TTDI tersebut.

Meski memiliki potensi yang tinggi, pariwisata di Indonesia sangatlah rentan jika dijadikan sebagai prioritas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pariwisata yang rentan terkena dampak besar jika tidak dikelola dan diperhatikan dengan baik adalah pariwisata pesisir (Marafa, 2008; Pramudyanto, 2014). Peningkatan industri pariwisata khususnya di daerah perkotaan cenderung mendorong peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan di tempat tersebut, akibatnya terjadi deplisit/ pengurangan jumlah sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak jarang pasokan kebutuhan banyak yang disupply oleh tempat lainnya termasuk daerah pesisir dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau pun mendukung kegiatan pariwisata baik di tingkat lokal maupun nasional (Pramudyanto, 2014). Dengan adanya ketersediaan sumber daya tinggi di kawasan pesisir menunjukkan alasan yang kuat tentang banyaknya pembangunan baik dengan orientasi ekonomi maupun pariwisata yang telah difokuskan pada kawasan pesisir dan laut, seperti keberadaan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di beberapa wilayah termasuk di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Meskipun pembangunan pesisir memberikan dampak positif, perkembangannya juga dapat berdampak negatif pada penurunan

kualitas lingkungan diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya untuk kegiatan pariwisata. Sehingga, manajemen dan pengembangan dari pariwisata pesisir harus diperhatikan dalam meminimalisir kemungkinan dampak negatif yang muncul (Plaituka, Nugraha, & Mantolas, 2022). Untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan pariwisata pesisir berjalan dengan baik, keberadaan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni diperlukan dalam pengelolaan pariwisata pesisir (Fikri, Munibah, & Yulianda, 2023; Plaituka et al., 2022).

Beberapa literatur mengemukakan bahwa komunitas pada destinasi pariwisata, termasuk masyarakat, perlu didorong untuk ikut berpartisipasi dalam praktik perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata sehingga pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai (Nicholas, Thapa, & Ko, 2009; Sheldon & Abenoja, 2001; Simmons, 1994; Wondirad & Ewnetu, 2019; Xua, Jiang, Wall, & Wang, 2019). Hal ini didukung oleh sejumlah studi kasus yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang kohesif dalam pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi aktif dalam pelestarian ekologi dan kehidupan sosial-budaya (de Haas, 2002; Hunt & Peterson, 2014; Jamal & Stronza, 2009; Sharpley, 2009; Snyman, 2014; Wondirad & Ewnetu, 2019; Zapata, Hall, Lindo, & Vanderschaeghe, 2011). Pada implementasi pengembangan pariwisata di lapangan, keterlibatan masyarakat masih banyak yang terkendala untuk tingkat strategis, perencanaan dan operasional, dimana saat ini tingkat partisipasi masyarakat secara umum di Indonesia masih belum

memadai (A. T. Putra & Suroso, 2023). Selain itu, pariwisata pesisir sebagai sektor yang dinamis, dituntut untuk dapat secara aktif memperhitungkan program, kebijakan, dan rencana yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan dalam jangka panjang. Dimana hal ini tidak hanya mencakup sumber daya alam dan masyarakat tetapi keamanan dan resiko tidak terduga yang mungkin muncul di masa mendatang (C. Michael Hall, 2001). Banyak dari wilayah pesisir yang dikembangkan pada sektor pariwisata yang cenderung tidak matang sehingga menimbulkan dampak negatif pada wilayah tersebut yang menurut Hall (2001) dipengaruhi oleh tiga alasan yakni: (1) kepentingan bisnis dan politik - memprioritaskan sektor lain selain pariwisata seperti kesehatan; (2) memprioritaskan kesejahteraan dan pendidikan dibandingkan dengan sektor pariwisata di kawasan pesisir; serta (3) kurang tersedianya SDM di bidang pariwisata maupun peneliti di bidang tersebut.

Dalam kontes perkembangan pariwisata di Indonesia, pariwisata di provinsi NTB berkembang dengan pesat dan menjadi sektor prioritas dalam pembiayaan pembangunan daerah setelah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai salah satu destinasi super prioritas di Indonesia (Farhan, Buchori, & Sari, 2023). Keberadaan KEK Mandalika yang direncanakan sebagai pusat pariwisata yang terintegrasi memicu adanya berbagai pengembangan destinasi pariwisata di provinsi NTB khususnya pulau Lombok. Sebagai pulau dengan potensi laut serta tren destinasi pariwisata yang berkembang beberapa decade terakhir, daerah pesisir memiliki potensi yang besar untuk diminati wisatawan dikarenakan *sense of*

place yang ditawarkan (Carlsen & Butler, 2011; Farhan et al., 2023; Kurniawan, Adrianto, Bengen, & Prasetyo, 2016).

Sebagai salah satu kawasan yang terintegrasi dengan KEK Mandalika melalui Jalan Raya Sekotong, pariwisata pesisir di kawasan Sekotong memiliki peluang besar sebagai alternatif destinasi bagi para wisatawan yang berkunjung pada beberapa event internasional seperti MOTOGP, *World Super Bike* di KEK Mandalika (Farhan et al., 2023). Kawasan Sekotong memiliki berbagai potensi wisata pesisir yang begitu kaya seperti kawasan mangrove, pesisir dan pantai yang masih alami. Beberapa potensi ini sebenarnya telah lama dikembangkan sebagai destinasi pariwisata untuk dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara terutama dikarenakan keindahan pulau dan bawah lautnya yang masih terjaga sejak puluhan tahun lamanya. Dengan sumber daya alam yang luar biasa, kawasan pesisir Sekotong tidak hanya menjadi daya tarik dari pemandangannya namun juga sumber daya alam yang mana ini dapat mendukung tercapainya pariwisata yang berkelanjutan karena dapat memberikan peluang kerja dalam peningkatan ekonomi masyarakat, promosi budaya Sasak dan pelestarian lingkungan. Hal ini tentunya akan dapat tercapat jika dikelola dengan baik dan melibatkan berbagai sektor dan partisipasi kolaboratif antar pemangku kepentingan di destinasi pesisir kawasan Sekotong.

Demi mendukung perkembangan pariwisata yang menjadi kawasan penyangga KEK Mandalika ini, beberapa kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di kawasan Sekotong telah dilakukan baik yang

bersumber dari Dinas Pariwisata Lombok Barat, provinsi NTB maupun dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dinas Pariwisata Lombok Barat, 2022a, 2022b). Selain itu, terdapat beberapa destinasi pariwisata khususnya di wilayah pesisir kawasan Sekotong yang mulai dibuka untuk menarik perhatian dan lama tinggal dari pengunjung, seperti pantai Elak-Elak, Mangrove Tanjung Batu – Sekotong Tengah, dan masih banyak lagi.

Meskipun telah dilakukan upaya dalam pengembangan destinasi dan peningkatan kapasitas SDM di kawasan Sekotong, program pengembangan SDM yang telah dilakukan pemerintah tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Kolaborasi antara pemangku kepentingan khususnya kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat lokal di kawasan Sekotong masih belum tersinkronisasikan satu dengan yang lainnya. Beberapa destinasi pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah terbengkalai akibatnya kurangnya dukungan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Banyak destinasi baru yang telah dikembangkan di kawasan Sekotong, namun paket wisata yang ada di pasaran hanya terfokuskan pada daerah Gili seperti Gili Nanggu, Sudak, Kedis dan Gili Gede yang sudah lama beroperasi dan dikenal oleh wisatawan melalui travel dalam dan luar pulau Lombok. Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Lombok Barat tahun 2014 – 2020, tercatat kunjungan tertinggi ke Kawasan Sekotong adalah 25.261 wisatawan domestik dan mancanegara pada tahun 2015. Sementara di tahun yang sama kunjungan wisatawan ke Senggigi mencapai lebih dari 350.000 orang. Jumlah kedatangan wisatawan di tahun setelahnya menuju ke Sekotong berada di

bawah 21 ribu dan bahkan di masa pandemi Covid-19 jumlah kunjungan kurang dari 5000 pengunjung (Dinas Pariwisata Lombok Barat, 2021). Rendahnya kunjungan ini menunjukkan masih rendahnya minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara menuju ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Sekotong.

Beberapa studi menyatakan bahwa model yang ideal dalam pengembangan wilayah pesisir adalah adanya sinergisitas dan keterlibatan yang tepat antara pemangku kepentingan khususnya pemerintah dan masyarakat sehingga kesempatan untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dapat tercapai (Dewi, 2018; Nurhasanah, Alvi, & Persada, 2017).

Keterlibatan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya perlu juga dilakukan demi memaksimalkan pengembangan pariwisata di masa depan. Adapun pemangku kepentingan yang dimaksud dapat berperan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di tempat tinggalnya, yang dalam penelitian ini adalah kawasan pesisir Sekotong (Rachmawati & Fountain, 2020).

Meskipun demikian, penelitian terkait dengan pentingnya keterlibatan antara sektor pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Sekotong sampai saat ini belum pernah dilakukan. Berlatar belakang permasalahan dan studi yang telah dilakukan di atas, maka dalam tesis ini, peneliti akan mengidentifikasi dan menggali permasalahan yang menghambat

perkembangan destinasi pariwisata di Kawasan Sekotong, serta mengidentifikasi keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dalam pengembangan destinasi pariwisata dengan mengacu pada berbagai bentuk model yang sebelumnya telah dikembangkan oleh para ahli.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kondisi pengembangan pariwisata pesisir dan keterlibatan pemangku kepentingan di kawasan Sekotong, Lombok Barat?
2. Bagaimana strategi partisipasi koraboratif pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata pesisir yang berkelanjutan di kawasan Sekotong, Lombok Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis kondisi pengembangan pariwisata pesisir dan keterlibatan pemangku kepentingan di kawasan Sekotong, Lombok Barat
2. Menganalisis strategi partisipasi koraboratif pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata pesisir yang berkelanjutan di kawasan Sekotong, Lombok Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi pengembangan teori

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber informasi bagi penelitian yang akan datang. Keberhasilan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar/ model dalam pengembangan pariwisata pesisir dengan konsep berkelanjutan di kawasan wisata lainnya baik di dalam maupun luar pulau Lombok.

2. Kontribusi praktik dan manajerial

Diharapkan hasil temuan yang berupa konsep atau model pengembangan nantinya dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dinas pariwisata, pemerintah setempat (BUMDES) maupun masyarakat yang terlibat pada POKDARWIS dalam pengembangan pariwisata pesisir yang berkelanjutan (*Sustainable Tourism*). Selain itu, diharapkan hasil tersebut dapat mendorong pengembangan pariwisata pesisir di Kawasan Sekotong, Lombok Barat yang terintegrasi dengan baik ke dalam keseluruhan Rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPPARDA). Model yang dihasilkan dalam penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai upaya dalam pengembangan industri pariwisata di Sekotong sehingga menghasilkan dampak positif khususnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir.

3. Kontribusi kebijakan pariwisata

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategi dan penetapan kebijakan dalma

pengembangan pariwisata di Kawasan Sekotong khususnya pariwisata pesisir dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan.

